

Upaya Pemerintah Dalam Membina Moral Masyarakat di Daerah Sekitar Lokalisasi

UPAYA PEMERINTAH JOMBANG DALAM MEMBINA MORAL MASYARAKAT DI DAERAH SEKITAR LOKALISASI KLUBUK KELURAHAN SUKODADI KECAMATAN KABUH KABUPATEN JOMBANG**Yogig Sugianto**

08040254248(Prodi S1 PPKn, FIS, UNESA) yogigsugianto@yahoo.com

Totok Suyanto

0004046307 (Prodi S1 PPKn, FIS, UNESA) totoksuyantounesa@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan Bagaimana Upaya Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kelurahan Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang; (2) Mendeskripsikan Faktor yang menghambat Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kecamatan Kabuh Kelurahan Sukodadi Jombang. Penelitian ini menggunakan teori Struktural Fungsional dari Talcott Parson. Parson membagi empat fungsi dari sistem sosial yaitu, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola. Sedangkan Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan 13 Orang. Lokasi penelitian di Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Sumber data dalam penelitian ini adalah manusia, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Upaya pemerintah desa dalam mengatasi dampak sosial keberadaan lokalisasi klubuk bagi masyarakat Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang adalah diadakannya kegiatan pengajian rutin setiap malam jum'at serta penyuluhan kesehatan mengenai dampak keberadaan lokalisasi bagi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang berkerjasama dengan Puskesmas Kabuh yang dilakukan di Balai Desa Sukodadi dan dilakukannya pemeriksaan kesehatan terhadap para warga masyarakat serta PSK yang ada di kompleks lokalisasi Klubuk oleh Puskesmas Kabuh melalui program PUSLING (Puskesmas keliling) yang dilakukan setiap dua sampai tiga bulan sekali.

Kata Kunci: Upaya Pemerintah, Pembinaan Moral, Lokalisasi Klubuk**Abstract**

The purpose of this study are: (1) Describe the Government's efforts Jombang to Fostering Moral Society in the Regions Around Localization Klubuk Village Sukodadi Jombang District of Kabuh; (2) Describe the factors that hamper the Government Jombang to Fostering Moral Society in the Regions Around Localization Klubuk Sukodadi Jombang District of Kabuh village. This research uses Structural Functional theory of Talcott Parson. Parson split the four functions of the social system, adaptation, goal attainment, integration and maintenance of the pattern. While Methods This study used a qualitative approach the informant 13 people. Sukodadi research sites in the village, District Kabuh, Jombang. Source of data in this study is a human, events and documents. Data collection techniques by observation, interview and documentation. Based on the results of the study showed that: (1) The village government efforts in addressing the social impact to the community where the localization klubuk Sukodadi Rural District of Kabuh Jombang is holding regular teaching activities every Friday evening and health education on the impact of the presence of localization for the public will be undertaken by the District Government in collaboration with Health Care Center Kabuh conducted at Village Hall Sukodadi and do health checks on the citizens and PSK in the complex localization Klubuk by through Health Care Center Kabuh. will be undertaken every two to three months.

Keywords: Government Efforts , Moral Development , Localization Klubuk**PENDAHULUAN**

Dewasa ini kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia demikian pesatnya. Sebagai konsekuensi logis, pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, bukan berarti manusia yang

hanya menguasai IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) semata, melainkan harus pula memiliki IMTAQ (Imam dan taqwa).

Kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi ini menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-

konflik, baik yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi.

Dalam upaya mewujudkan manusia yang seutuhnya atau sumber daya manusia yang berkualitas tersebut, diperlukan upaya-upaya konkrit secara maksimal. Salah satu diantaranya adalah pembinaan dan peningkatan moral masyarakat.

Dimana manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri sehingga manusia disebut sebagai "makhluk sosial". Manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya serta bagaimana tanggungjawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Ciri manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial adalah adanya suatu bentuk interaksi sosial di dalam hubungannya dengan makhluk sosial lainnya yaitu antara manusia satu dengan manusia yang lainnya.

Interaksi sosial antar manusia tersebut semakin lama akan menghasilkan suatu kebiasaan dalam berperilaku. Kebiasaan tersebut lama kelamaan akan menjadi sebuah aturan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Aturan dalam masyarakat tersebut yang disebut dengan norma. Norma dalam masyarakat diberlakukan sebagai upaya dalam tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam masyarakat. Tindakan yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat biasa disebut dengan perilaku menyimpang atau penyimpangan sosial.

Salah satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia.

Krisis nilai-nilai moral yang dialami bangsa Indonesia hingga saat ini masih terus berlangsung dan belum dapat diatasi. Krisis nilai-nilai moral akan berdampak luas terhadap timbulnya berbagai krisis-krisis lainnya yang apabila tidak segera diatasi dengan penuh kesadaran bersama maka pada gilirannya akan membawa akibat buruk terhadap perkembangan pola pikir masyarakat. Kehidupan bermasyarakat akan lebih berbahaya lagi apabila perubahan pola pikir tersebut mengancam kepentingan bangsa dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat, yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikannya. Prostitusi berasal dari bahasa latin *prostituere* atau

prostauree, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, maupun percabulan. Pelacuran adalah gejala kemasyarakatan, dimana wanita menjual diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setara umur kehidupan manusia itu sendiri, yaitu berupa tingkah laku lepas kendali dan cabul, karena adanya pelampiasan nafsu seks dengan lawan jenisnya tanpa mengenal batas-batas kesopanan. Pelacuran selalu ada pada semua negara berbudaya, sejak zaman purba sampai sekarang (Kartini Kartono, (2003: 177-178).

David Kurniawan (2010: 3-4) menjelaskan bahwa lokalisasi sebagai salah satu tempat timbulnya penyakit masyarakat yang mempunyai sejarah panjang sejak adanya kehidupan manusia yang telah diatur norma-norma perkawinan sudah ada pelacuran, sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan tersebut dan tidak ada putus-putusnya, yang terdapat di semua negara di dunia ini. Norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi, dunia kesehatan menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan akibat adanya pelacuran ditengah masyarakat, namun masyarakat berabad-abad tidak pernah berhasil melenyapkan gejala-gejala ini. Berbagai cara penanggulangan mulai dari hukuman yang bengis terhadap pelacur, sampai kepada lokalisasi untuk rehabilitasi belum menunjukkan hasil-hasil nyata dan drama prostitusi berlangsung terus menerus hingga detik ini di muka bumi di negara manapun.

Agama memegang peranan penting untuk mengawal moral masyarakat sehingga tidak tergoda untuk melakukan perzinahan, sehingga bukan hanya perempuan saja yang diributkan mengalami keruntuhan moral dengan menjadi pekerja seks komersial. Sementara laki-laki yang notabene pemakai tidak di anggap mengalami keruntuhan moral. Sedangkan untuk anak-anak yang hidup dalam lingkungan sekitar lokalisasi itu akan melihat yang belum waktunya mereka tau kalau tidak adanya pendidikan moral dan agama kemungkinan besar anak-anak itu akan terjerumus menjadi pekerja seks komersial di kompleks prostitusi. Melihat kenyataan tersebut adanya penataan lagi agar budaya *patriarkhis* yang menempatkan perempuan pada posisi tawar yang sangat rendah. Salah satunya dengan memberikan pendidikan dan perlindungan yang memadai bagi perempuan sehingga dapat menentukan dengan bebas sesuai syarat agama tanpa pihak manapun dalam memilih jalan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, prostitusipun semakin marak dalam bentuk atau model yang beraneka ragam, misalnya wanita panggilan, karyawan salon yang memberikan layanan plus, tukang pijat dan bentuk-bentuk lainnya.

Permasalahan prostitusi di Jombang sebenarnya sudah diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang

Pelarangan Pelacuran di wilayah Kabupaten Jombang, serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Kabupaten Jombang. Namun, adanya Perda tersebut dirasa belum bisa berjalan secara sempurna. Namun pada dasarnya, lokalisasi mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mengurangi berbagai dampak negatif dari kegiatan prostitusi. Selain itu, lokalisasi dapat mempermudah pengawasan terhadap PSK terkait dengan kesehatan, keamanan, narkoba, serta penyebaran HIV/AIDS.

Keberadaan lokalisasi kini menjadi suatu masalah yang cukup besar ketika dampak dari keberadaannya telah mengganggu perkembangan moral bangsa khususnya para generasi penerus khususnya yang berada pada lingkungan lokalisasi. Secara langsung maupun tidak, keberadaan serta aktivitasnya akan mempengaruhi perkembangan moral anak-anak di sekitarnya karena mereka secara langsung berada pada lingkungan tersebut. Keadaan tersebut akan bertambah mengganggu perkembangan anak ketika anak tersebut juga merupakan anak dari para PSK. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, pendidik dan PSK sendiri.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti di sini ingin melakukan penelitian tentang upaya pemerintah kabupaten jombang dalam membina moral masyarakat sekitar lokalisasi. Peneliti mengambil Lokalisasi Klubuk karena lokalisasi ini adalah lokalisasi yang masih tersisa (ilegal), tetapi keberadaannya yang ada di sekitar perkampungan warga Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh ini mulai dari tahun 1993 sampai sekarang. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kelurahan Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang”.

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kelurahan Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, serta faktor apa yang menghambat Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kecamatan Kabuh Kelurahan Sukodadi Jombang.

Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Tujuan pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Pemerintah daerah menurut Bastian (2001 : 203)

didefinisikan sebagai “Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah berserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah”. Sedangkan pengertian pemerintah daerah menurut Halim (2007 : 2) adalah “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan DPRD”. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya pemisahan secara konkrit antara eksekutif dan legislatif yang dapat memicu tidak berjalannya pengawasan secara efektif.

Secara yuridis formal disebutkan, pengertian dari pemerintah daerah disebutkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi seluas-luasnya daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan adanya

pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, "Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat." Pasal 18 ayat (6) menyatakan, "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan oleh pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain :

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan

dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomidaerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan terjemahan dari kata Inggris *training* yang berarti latihan, pendidikan, pembinaan. Pembinaan menekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Unsur dari pembinaan adalah mendapatkan sikap (*attitude*), dan kecakapan (*skill*). (Mangunhardjana, 1986 : 11).

Jadi definisi pembinaan menurut Mangunhardjana (1986 : 11) adalah suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya, untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan bekerja yang sedang dijalani dengan efektif. Dengan demikian pembinaan dapat dilakukan oleh dan dimanapun berada. Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi di luar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan.

Pengertian Tentang Moral

Pengertian moral berasal dari bahasa latin *mores*, dari suku kata *mos* yang artinya adat istiadat, kelakuan, watak, tabiat, akhlak (Prent dalam Soenarjati 1989 hal 25). Dalam pengembangan moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertindak laku yang baik, yang susila (Prent dalam Soenarjati 1989 hal 25). Dari pengertian ini dikatakan bahwa moral adalah berkenaan dengan kesusilaan. Seorang individu dikatakan baik secara moral apabila bertindak laku sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang ada di masyarakat. Sebaliknya jika perilaku individu itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ia akan dikatakan bermoral jelek. Terkait dengan persoalan moral, para ahli psikologi dan ahli filsafat tidak didapatkan kata

sepakat mengenai persoalan apa sebenarnya yang membentuk suatu masalah moral. Namun demikian sebagian para ahli sependapat bahwa masalah moral akan muncul manakala terjadi pertentangan ataupun konflik mengenai persoalan tujuan, rencana, hasrat ataupun keinginan serta harapan manusia.

Oleh sebab itu untuk membentuk moral yang baik maka di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat perlu juga diterapkan nilai agama agar iman dan takwa seseorang tetap ada. Tujuan utama pembinaan moral adalah menghasilkan individu yang otonom, memahami nilai-nilai moral dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Selain itu juga Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu tanpa moral manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral adalah nilai ke-absolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan Agama.

Berbagai pendapat tersebut meskipun berbeda rumusnya, namun memiliki kesamaan arti. Jadi moral merupakan perbuatan yang membicarakan baik buruk, benar atau salah terhadap tingkah laku manusia yang berhubungan dengan hati batin seseorang. Dengan kata lain moral atau kesusilaan menurut Bambang Daruso (1986 : 23) adalah “keseluruhan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar”. Untuk memikirkan benar atau salah perbuatan yang dilakukan maka diperlukan penalaran moral. Penalaran moral menekan pada alasan mengapa suatu tindakan dilakukan, dari pada sekedar arti suatu tindakan, sehingga dapat dinilai apakah tindakan tersebut baik atau buruk. Penalaran moral yang dimiliki oleh seseorang berbeda karena tiap orang memiliki pemikiran yang berbeda dalam menanggapi suatu tindakan itu benar atau salah. Dengan demikian diperlukan standar moral untuk menentukan benar salahnya suatu teori.

Standar moral merupakan prinsip-prinsip moral dasar atau prinsip-prinsip yang menyediakan kriteria untuk menentukan benar-salahnya suatu teori. Standar moral

maksudnya untuk memperoleh keseragaman pemahaman dalam memformulasikan pernyataan-pernyataan yang salah atau benar. Pernyataan-pernyataan yang salah atau benar. Pernyataan-pernyataan tersebut mengandung kriteria bahwa tindakan yang diharapkan memuaskan yang dianggap benar.

Setelah kita mengetahui pengertian pembinaan dan moral secara tersendiri, maka dapat kita artikan bahwa pembinaan moral merupakan suatu tindakan untuk mendidik, membina akhlaq serta perilaku seseorang agar mampu memahami, menghayati sifat-sifat baik atau aturan-aturan moral untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan standar moral dan aturan-aturan moral. Dengan Pendekatan eksperiensial (*Experiencial approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa seseorang terlibat di dalam pembinaan. Dan ini disebut sebagai belajar yang sejati karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

Pengertian Tentang Masyarakat

Istilah Masyarakat berasal dari kata *Society* yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *Syirk*, artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu karena ada bentuk aturan-aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan (Munandar, 1986:63).

Soelaeman(1986:67-68) juga mengemukakan bahwa “Masyarakat merupakan suatu lingkungan yang bersifat makro”. Aspek teritorial kurang ditekankan, namun aspek keteraturan sosial dan wawasan hidup kolektif memperoleh bobot yang lebih besar. Sifat makro diperoleh dari kenyataan, bahwa masyarakat pada hakekatnya terdiri dari sekian banyak komunitas yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga dan individu-individu” (Soelaeman, 1986:67-68).

Melihat masyarakat sebagai sekumpulan sub-sub kolektiva atau sub-sub kelompok yang longgar. Etzioni menyatakan bahwa negara dan yang lebih umum, proses politik nasional jauh lebih banyak berhubungan dengan organisasi-organisasi yang merupakan sub-sub kolektif, dan dengan kombinasi-kombinasi kolektif ketimbang dengan organisasi yang tidak memiliki dasar kolektif. Dengan demikian dalam masyarakat post-modern, masyarakat bukan bertanggungjawab kepada individu, tetapi lebih bertanggung jawab kepada kolektiva atau kelompok yang bertindak secara bersama-sama.

Menurut Munandar Soelaeman, untuk arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial. Kesatuan sosial mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat,

kesadaran rakyat, dan sebagainya. Individu berada dibawah pengaruh suatu kesatuan sosial. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peranan sosial (Soelaeman, 1989:63-64). Pendapat-pendapat tersebut mengenai masyarakat dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan yang memiliki potensi untuk dapat berperan dalam kehidupan sosialnya.

Pengertian Tentang Lokalisasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia lokalisasi diartikan wilayah atau tempat tertentu yang dibatasi karena alasan khusus (Sulchan 1997 : 324). Lokalisasi merupakan suatu bentuk dari legalisasi aktifitas prostitusi secara eksklusif pada suatu wilayah tertentu.

Pada dasarnya adanya lokalisasi berawal dari prostitusi atau kegiatan pelacuran yang sulit dan mustahil untuk dihapus, karena prostitusi sudah ada sejak dahulu. Oleh karena itu lokalisasi menjadi solusi akhir dan dianggap yang ideal untuk hal tersebut.

Dengan adanya gagasan lokalisasi banyak mengandung pro dan kontra bagi masyarakat. Bagi mereka yang pro mendukung adanya ide lokalisasi karena dianggap sebagai solusi yang ideal dan bertujuan untuk mempermudah kontrol dan pengawasan terhadap praktek-praktek prostitusi, sehingga dapat menekan efek negatif yang ditimbulkannya, seperti penyebaran penyakit kelamin dan HIV/AIDS. Dan diharapkan adanya gagasan lokalisasi dapat menghindari merebaknya keresahan sosial seandainya para pelaku prostitusi dibiarkan beredar dijalan. Serta gagasan lokalisasi ini menjadi pengendali yang secara perlahan-lahan diyakini dan akan mampu meminimalisir praktek prostitusi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Lokalisasi hingga sampai saat ini belum dapat ditutup semua oleh pihak berwajib dan belum ada perda yang mengatur tentang lokalisasi. Karena lokalisasi dianggap sebagai salah satu dari penanggulangan dari praktek prostitusi dijalan. Disamping lokalisasi inilah para pelanggan atau konsumen dapat memilih tempat penginapan, karaoke, atau bahkan para WPS.

Kehidupan masyarakat maupun para pekerja seks komersial di lokalisasi berhubungan dengan baik, saling membantu satu sama lain. Mereka juga tidak hanya dapat membuka tempat-tempat karaoke dan penginapan saja. Akan tetapi masyarakat sekitar lokalisasi maupun WPS itu sendiri aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah maupun dari lembaga lain. Salah satu contohnya di lokalisasi Klubuk pada saat pemilu 2014 mereka yang tinggal di lokalisasi mengikuti pemilu, dan di tahun 2014 mereka yang berada di lokalisasi Klubuk baru saja mengadakan peringatan hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dengan mengadakan berbagai lomba seperti

lomba tarik tambang, lomba balap karung, hingga membaca Al-Quran. Tujuan diadakan berbagai lomba dan kegiatan di lingkungan untuk membangkitkan kepercayaan diri para WPS, dan agar tidak bergantung pada potensi (pasar) seks komersial kepercayaan ataupun kelah setelah terjun di masyarakat mempunyai keahlian.

Lokalisasi Klubuk bukan hanya ada tempat-tempat hiburan saja, tetapi di lokalisasi tersebut ada mushola yang sering digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan salah satu contohnya pada saat memperingati besar islam.

Dengan hadirnya berbagai kegiatan positif di lokalisasi mengurangi sedikit pandangan masyarakat tentang kehidupan di lokalisasi. Akan tetapi lokalisasi masih menjadi suatu hal yang meresakan masyarakat karena secara tanpa disadari adanya lokalisasi termasuk dari legalitas dari pemerintah yang belum dapat dihilangkan.

Lokalisasi Sebagai Pantologi Sosial

Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks, dengan imbalan pembayaran. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. Pelacuran adalah perilaku menyimpang dengan tujuan komersial. Perilaku ini melanggar norma, kaidah, dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Bagi yang melakukan pelacuran, tidak saja akan mendapat sanksi dari masyarakat, melainkan pula sanksi agama. Sampai saat ini pelacuran sulit untuk diberantas. Pelacuran merupakan penyakit sosial yang sangat parah dan sampai sekarang sangat sulit untuk dihilangkan. Munculnya berbagai macam penyakit kelamin yang mematikan seperti halnya HIV AIDS adalah akibat buruk dari praktek-praktek pelacuran tersebut. Norma adat pada umumnya melarang pelacuran. Akan tetapi, setiap daerah berbeda peraturannya, dan kebanyakan norma tersebut tidak tertulis. Pelacuran menimbulkan beberapa akibat. Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran antara lain sebagai berikut: 1). Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. 2). Merusak sendi-sendi moral, hukum, susila dan agama. 3). Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. 4). Mendorong terjadinya kriminalitas dan kecanduan barang-barang narkotika

(Kartini Kartono, 1981:212-213) Sebagai makhluk sosial, manusia diyakini tidak dapat sendiri. Manusia merupakan bagian dari kelompok komunal yang membutuhkan uluran tangan orang lain. Dalam menjani interaksi dengan lingkungannya, sudah barang tentu setiap kelompok mempunyai kaidah-kaidah agar interaksi

diantara mereka dapat berjalan dengan baik. Etika dan moral, merupakan dua hal yang sering dijadikan alat ukur untuk mengukur kepantasan perilaku yang dilakukan seseorang. mana yang dianggap pantas, dan mana yang dianggap tidak pantas. Mana yang dianggap baik, dan mana yang dianggap buruk. Semuanya berkaitan dengan ukuran-ukuran normatif yang berlaku dimasyarakat tertentu. Bila etika meliputi semua tindak tanduk pribadi dan social yang dapat diterima mulai dari tata aturan, norma sopan-santun yang menjadi acuan kita dalam bersosialisasi. Maka, moral mempunyai lingkup yang lebih khusus. Pada dasarnya, moral merupakan bagian dari hukum etika. Moralitas memiliki kedudukan untuk menilai keseriusan pelanggaran yang telah dilakukan. Dapat dicontohkan orang yang berbuat zina dikatakan orang yang tidak mempunyai etika dan aturan. Sedangkan orang yang menjual diri atau sering disebut dengan melacurkan diri dikatakan tidak bermoral dan dalam kehidupan masyarakat hal-hal seperti itu tidak di terima. Dampak sosial yang ditimbulkan dari keberadaan kompleks lokalisasi Klubuk bagi masyarakat Desa Sukodadi adalah: a). Adanya efek buruk terhadap kesehatan warga masyarakat Desa Sukodadi yang sering mengunjungi dan memakai jasa PSK di kompleks lokalisasi Klubuk yaitu dengan adanya warga Desa sukodadi yang mempunyai penyakit kelamin “raja singa” dengan gejala yaitu timbul benjolan di sekitar alat kelamin. Kadang-kadang disertai pusing-pusing dan nyeri tulang seperti flu, yang akan hilang sendiri tanpa diobati. Ada bercak kemerahan pada tubuh sekitar 6-12 minggu setelah hubungan seks. Temuan penelitian tersebut sesuai dengan salah satu dengan pendapat Kartini Kartono (1981: 212-213) yang menyatakan bahwa ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pelacuran atau prostitusi, yaitu antara lain: “menimbulkan dan menyebarluaskan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang banyak terdapat ialah syphilis, raja singa dan gonorrhoe (kencing nanah)”. Berdasarkan temuan penelitian dan pendapat dari Kartini Kartono diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan kompleks lokalisasi Klubuk membawa dampak buruk bagi kesehatan warga Desa Sukodadi yang mengunjungi dan memakai jasa PSK di komplek lokalisasi Klubuk yaitu dengan terkena gejala penyakit raja singa. b). Keberadaan lokalisasi Klubuk tersebut sedikit banyak meringankan beban perekonomian warga sekitar yang berprofesi sebagai pedagang yang membuka usaha warung dan toko. Bahkan ada warga pemilik toko yang dengan hasil membuka toko dapat menyekolahkan anaknya sampai SMA. Jadi keberadaan lokalisasi klubuk tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga membawa dampak positif yaitu menambahnya pendapatan pedagang di sekitar kompleks lokalisasi. c). Keberadaan kompleks lokalisasi Klubuk membawa dampak bagi keberlangsungan rumah tangga beberapa warga yang

sering mengunjungi kawasan kompleks lokalisasi tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Kartini Kartono (1981: 212-213) bahwa “salah satu akibat dari ditimbulkan oleh pelacuran atau prostitusi adalah merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga dapat menjadi berantakan dan menimbulkan perceraian”. Dengan demikian dampak yang ditimbulkan dari adanya Lokalisasi Klubuk terhadap kehidupan rumah tangga adalah adanya keretakan rumah tangga karena suami tertarik dengan pekerja seks komersial di kompleks lokalisasi Klubuk.. d). Keberadaan musholah di area lokalisasi Klubuk ini memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar lokalisasi. Hal ini dibuktikan dengan dimanfaatkannya mushola tersebut untuk menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak-anak warga sekitar lokalisasi dan juga dimanfaatkan warga untuk sholat berjamaah. Dengan pendidikan agama secara tidak langsung juga membentuk moralitas yang baik pada diri anak-anak warga lokalisasi dan warga sekitar lokalisasi tersebut.

Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parson

Salah satu teori yang melandasi studi masyarakat diantaranya adalah Teori Struktural-fungsional. Pendekatan teori sosiologi struktural-fungsional biasa digunakan oleh Spencer dan Durkheim yang menyangkut struktur (aturan pola sosial) dan fungsinya dalam masyarakat (Skidmore 1979; Spencer dan Inkeles 1982; Turner 1986; Schwartz dan Scott 1994; Macionis 1995; Winton 1995) dan pada kehidupan sosial secara total (McQuarie 1995). Penganut pandangan teori struktural-fungsional melihat sistem sosial sebagai suatu sistem yang seimbang, harmonis dan berkelanjutan. Konsep struktur sosial meliputi bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir.

William F. Ogburn dan Talcott Parsons adalah para sosiolog ternama yang mengemukakan pendekatan struktural fungsional dalam kehidupan bermasyarakat pada abad ke-20. Pendekatan teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial yang kemudian diakomodasi dalam fungsi sesuai dengan posisi seseorang dalam struktur sebuah sistem (Megawangi 1999). Talcott Parsons (Klein & White 1996) terkenal dengan konsep pendekatan sistem melalui AGIL (*Adaptation; Goal Attainment; Integration; and Latency*), yaitu adaptasi dengan lingkungan, adanya tujuan yang ingin dicapai, integrasi antar sub-sub sistem, dan pemeliharaan budaya atau norma/ nilai-nilai/ kebiasaan.

Strukturalisme fungsional dari Talcot Parson menyatakan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai

kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Dalam hal ini, fokus teori struktural fungsional Talcott Parson tertuju pada orientasi subjektif individu dalam berperilaku mencapai tujuan dengan alat-alatnya (sarana).

Parson (dalam Puspitawati, 2009:14), sistem memiliki empat fungsi yakni sebagai berikut: a). *Adaptation* (adaptasi). Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. b). *Goal attainment* (pencapaian tujuan). Sebuah sistem harus mendefinisikan diri untuk mencapai tujuan utamanya. c). *Integration* (integrasi). Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. *Latency* (pemeliharaan pola). Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki, baik motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Dalam penelitian upaya pemerintah jombang dalam membina moral masyarakat di daerah sekitar lokalisasi menggunakan teori fungsional struktural Talcott Parson karena penelitian ini lebih menonjolkan suatu sistem perilaku/sikap dalam lingkungan masyarakat, bagaimana di dalam masyarakat diajarkan tentang nilai dan norma sebagai pedoman dalam mendidik di lingkungan keluarga atau masyarakat agar seseorang mempunyai moral yang baik

METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Pada pendekatan ini, fenomena yang sosial yang akan ditelaah yaitu mengenai Upaya Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kecamatan Kabuh Kelurahan Sukodadi Jombang serta Faktor apa yang menghambat Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kecamatan Kabuh Kelurahan Sukodadi Jombang. Dengan metode-metode yang telah ditentukan, peneliti akan meneliti Upaya Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat

Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kecamatan Kabuh Kelurahan Sukodadi Jombang serta Faktor apa yang menghambat Pemerintah Jombang Dalam Membina Moral Masyarakat Di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kecamatan Kabuh Kelurahan Sukodadi Jombang yang terjadi dengan adanya lokalisasi tersebut. Dalam penelitian ini, agar penelitian berjalan dengan lancar peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Jombang, lebih tepatnya pada masyarakat sekitar Lokalisasi Klubuk di Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Hal ini dikarenakan Lokalisasi Klubuk masih ada dan berkembang. Sedangkan di tempat lokalisasi lain misalnya di Tunggorono saat ini sudah tidak beroperasi lagi karena lokasinya terlalu dekat dengan kota. Waktu penelitian dilakukan dari terhitung sejak penelitian ini mulai direncanakan dan proposal dibuat sampai pada penyusunan laporan penelitian. Pada penelitian ini yang dijadikan Pejabat pemerintahan setempat, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur kesra, dan RT/RW, Warga masyarakat yang tinggal di sekitar lokalisasi klubuk berumur 30 tahun sampai 50 tahun sebanyak 5 informan.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini Pengumpulan data merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam melakukan penelitian, dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini metode yang digunakan antara lain : (1). Wawancara, Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara di mana penulis menggunakan daftar pertanyaannya yang telah disusun sebelumnya. Penulis menggunakan wawancara terstruktur agar pertanyaan lebih terfokus, sehingga data yang diperoleh tidak akan melenceng dari pokok permasalahan (Esterberg dalam Sugiyono 2010: 233). Selain itu wawancara terstruktur yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data, dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan juga, dimana adanya kontak langsung dengan tatap muka antara peneliti dengan yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informan yang dapat memberikan informasi secara detail terkait upaya pemerintah jombang dalam membina moral masyarakat di daerah lokalisasi klubuk kelurahan sukodadi kecamatan kabuh kabupaten jombang. (2). Observasi, Menurut Mashall dalam sugiono (2008 : 310) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Observasi secara sempit dapat diartikan sebagai memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa “mengobservasikan dapat pula dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba. (Arikunto, 2009:156). Observasi yang telah dilakukan dalam penelitian ini antara lain observasi mengenai kantor

pemerintahan sekitar Lokalisasi Klubuk yang bertujuan untuk mengetahui upaya pemerintah membina moral warga sekitar lokalisasi. Peneliti juga melakukan observasi terhadap Masyarakat untuk mengetahui dampak sosial yang terjadi dengan keberadaan lokalisasi tersebut. a). Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Suharsimi Arikunto, 2006 : 158). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai keberadaan objek yang diteliti, di samping juga untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari hasil observasi (pengamatan), wawancara dan Dokumen. Dalam penelitian ini berupa informasi tertulis yang berkenaan dengan Upaya pemerintah setempat dalam membina moral masyarakat sekitar lokalisasi Klubuk.

Penelitian ini menggunakan analisis data yang diadopsi dari Miles dan Huberman (dalam Basrowi, Suwandi, 2008:209) yang mencakup tiga kegiatan antara lain, *pertama* reduksi data. Reduksi data diartikan Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

Kedua, reduksi data. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian, menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak kenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian penelitian dalam melaksanakan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang yang dipandang lebih ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Ketiga, penyajian data Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan atau kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk teks narasi atau uraian yang menyerupai cerita setelah data terkumpul dan diklasifikasikan menurut kodenya. Bentuk narasi tersebut dimulai dari langkah awal peneliti menuju lapangan sampai mengakhiri kegiatan penelitian.

Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Dalam Membina Moral Masyarakat di Daerah Sekitar Lokalisasi Klubuk Kelurahan Sukodadi Kabuh Jombang

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembinaan moral masyarakat Desa Sukodadi adalah pertama, melalui penanaman nilai-nilai agama, kesopanan dan asusila dengan diadakannya pembinaan moral bagi masyarakat khususnya pada anak-anak agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di lingkungan lokalisasi, karena dengan menanamkan nilai-nilai tersebut seseorang tidak akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya menanamkan nilai-nilai keagamaan, seperti diadakannya pengajian rutin setiap malam jum'at di masjid yang diikuti oleh warga dan anak-anak di sekitar lokalisasi, yang dipimpin langsung oleh Kaur Kesra (Moden/Tokoh Agama) Kelurahan Sukodadi serta menanamkan sopan santun pada warga dan anak-anak karena hal ini berkaitan dengan pembinaan moral yang ada di masyarakat sekitar lokalisasi Klubuk. Menurut Bapak Pono (42) Selaku Kaur Kesra Kelurahan Sukodadi mengatakan :

“Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembinaan moral masyarakat itu mas melalui penanaman nilai-nilai agama seperti pengajian atau baca al-qur'an, dan ceramah keagamaan secara rutin yang diikuti oleh warga dan anak-anak Dusun Klubuk yang dilaksanakan setiap malam jum'at di masjid yang letaknya tidak jauh dari lokalisasi, materi ceramah mencakup tiga dimensi, pertama yaitu dimensi keyakinan yang merujuk kepada tingkat seseorang muslim terhadap kebenaran agama islam. Dari sinilah keyakinan yang merujuk kepada keimanan tentang ke-ESAan Allah. Kedua dimensi ibadah yang merujuk kepada tingkat kepatuhan dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan beribadah yang diwajibkan Islam, seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya. Ketiga dimensi akhlak, dimensi akhlak ini merujuk kepada perilaku sehari-hari, seperti tolong menolong antar sesama, jujur, tanggung jawab dan sebagainya”.

(Wawancara 16 April 2015)

Hal tersebut juga disampaikan Ibu Sulastri (41) warga dusun klubuk yang menyatakan bahwa:

“materi yang disampaikan oleh Bapak Pono yaitu tentang keyakinan terhadap Allah, kebesaran Allah, terus tentang praktek agama yaitu tentang bagaimana cara shalat dan wudlu, dan tentang akhlak atau tingkah laku atau sopan santun.” (wawancara 30 Mei 2015)

Senada apa yang dikatakan oleh Ibu Lela (32) seorang PSK lokalisasi klubuk yang menyatakan bahwa:

“materi yang disampaikan oleh Bapak Pono yaitu tentang keyakinan terhadap Allah, praktek ibadah (Bagaimana cara shalat, wudlu, amal/infak, tahlil dan lain-lain yang berhubungan dengan agama Islam) dan kami juga diberi materi tentang akhlak bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama manusia. Selain itu juga setiap bulan puasa saya dan sebagian besar teman saya ada yang puasa dan tetap terawih, tadarusan di masjid. Karena materi-materi yang disampaikan oleh Bapak Pono itu bisa menjadi bekal ketika kami sudah keluar dari sini mas, sebab kami juga ingin hidup yang lebih baik.” (wawancara 30 Mei 2015)

Selain itu Bapak Sarjono (48) Ketua RT.12 RW.06 yang menyatakan bahwa :

“Alhamdulillah mas semua semua warga disini sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena di dalam al-qur'an mengajarkan akhlak, budi pekerti, mana perbuatan yang batil dan yang benar, dan lain sebagainya. Kegiatan ini merupakan salah satu program Kepala Desa Sukodadi agar warganya tidak terjerumus atau terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik dengan adanya lokalisasi tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan serta apa akibatnya

jika melanggar nilai-nilai agama yang terdapat dalam al-qur'an.” (wawancara 30 Mei 2015)

Hal tersebut juga dipertegas Bapak Sudarto (40) Kepala Desa Sukodadi menjelaskan bahwa:

“Memang benar mas kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya saya dalam membina moral masyarakat khususnya warga dan anak-anak di Dusun Klubuk yang letaknya sangat dekat dengan lokalisasi. Saya sebagai Kepala Desa tidak ingin warga saya terjerumus atau terpengaruh hal-hal yang kurang baik yang ditimbulkan dari keberadaan lokalisasi itu. Maka saya mengadakan program kegiatan yaitu pengajian rutin dan ceramah keagamaan di masjid setiap malam jum'at yang dipimpin langsung oleh Bapak Pono selaku Kaur Kesra Desa Sukodadi ini.” (Wawancara 16 April 2015)

Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah desa Sukodadi adalah dilakukannya program penyuluhan kesehatan kepada warga masyarakat Sukodadi sebagai wujud pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh keberadaan lokalisasi Klubuk. Dan juga diadakan pemeriksaan kesehatan para PSK dan warga di lokalisasi Klubuk. Program penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan cara menyebarkan pesan dan menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan. Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat sekitar lokalisasi Klubuk merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, khususnya pemerintahan Kabupaten Jombang melalui Dinas Sosial. Penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak lokalisasi terhadap kesehatan bertujuan untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh adanya lokalisasi tersebut. Hal ini dipertegas oleh Ibu Erika (42) Bidan Polindes Kelurahan Sukodadi menyatakan :

“Penyuluhan dampak lokalisasi klubuk terhadap kesehatan masyarakat memang pernah dilakukan beberapa kali di balai Desa Sukodadi. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas kerjasama oleh Dinas Sosial Kabupaten Jombang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir

keberadaan lokalisasi klubuk terhadap kesehatan masyarakat di daerah sekitar lokalisasi. Penyuluhan tersebut dilakukan beberapa kali di balai desa.” (wawancara 16 April 2015)

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kardi (48) Ketua program penanggulangan penyakit menular Puskesmas Kabuh menyatakan bahwa :

“Memang benar kita melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat sekitar lokalisasi tersebut. Kegiatan tersebut ditujukan kepada masyarakat Sukodadi yang berada dekat dengan daerah lokalisasi untuk mencegah penularan penyakit seperti HIV AIDS. Kegiatan tersebut dilakukan antara 2 sampai 3 bulan sekali melalui Puskesmas Keliling atau disebut PUSLING. Kegiatan tersebut juga termasuk dalam program kami”. (wawancara 17 April 2015)

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sunarseh (35) salah satu warga yang berada di lokalisasi Klubuk yang menyatakan bahwa :

“2 sampai 3 bulan sekali mas para warga disini diperiksa oleh petugas Puskesmas. Biasanya dilakukan pemeriksaan oleh 3 sampai 4 petugas” (wawancara 17 April 2015)

Hal tersebut juga disampaikan oleh Rina (26) salah satu PSK lokalisasi klubuk yang menyatakan bahwa :

“ memang benar mas 2 sampai 3 bulan sekali para PSK disini diperiksa oleh petugas Puskesmas Kabuh. Katanya sih kegiatan tersebut sangat penting bagi kesehatan kami khususnya para PSK untuk mencegah penularan penyakit seperti HIV AIDS. saya sih ngikuti saja mas apa yang menjadi agenda pak lurah, yang penting tidak merugikan kami khususnya para PSK.” (wawancara 30 Mei 2015)

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Sudarto (40) Kepala Desa Sukodadi menjelaskan :

“Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak keberadaan lokalisasi klubuk terhadap masyarakat yaitu berupa penyuluhan kesehatan yang dilakukan di Balai Desa Sukodadi oleh Puskesmas Kabuh. Penyuluhan tersebut sudah dilakukan beberapa kali mas.” (wawancara 17 April 2015)

Berdasarkan wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa di Kelurahan Sukodadi dilakukan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti kegiatan pengajian rutin setiap malam jum'at serta penyuluhan kesehatan mengenai dampak dari keberadaan lokalisasi Klubuk. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membina moral masyarakat di daerah sekitar lokalisasi dan kegiatan penyuluhan kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas Kubuh yang dilakukan di Balai Desa Sukodadi. Penyuluhan tersebut dilakukan 2 sampai 3 bulan sekali.

Faktor Penghambat yang dialami pemerintah dalam membina moral masyarakat di daerah lokalisasi klubuk Kelurahan Sukodadi

Dalam hal ini pemerintah melakukan pembinaan moral masyarakat sekitar lokalisasi Klubuk tidak selalu berjalan lancar. Setelah mengadakan wawancara dengan perangkat Desa Sukodadi, ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pembinaan moral. Hambatan tersebut antara lain: (1). Belum banyaknya tokoh agama yang mencoba terjun langsung ke objek lokalisasi sehingga proses pembinaan belum bisa maksimal.

Hal ini diungkapkan Bapak Abdullah (51) sebagai tokoh masyarakat Desa Sukodadi yang menyatakan bahwa:

“Masalah yang ada pada pembina ini terkait dengan kuantitas tenaga mas, karena cuman Pak Modin saja yang melukan bimbingan disini sehingga terjadi minimnya kegiatan keagamaan di dalam lokalisasi karena kurangnya tenaga pendidik yang menyebabkan kegiatan pembinaan tidak bisa berjalan secara maksimal. Selain itu faktor keuangannya juga mas untuk pendanaan pembinaan, untuk mendatangkan tenaga pembina dari luar” (wawancara 30 Mei 2015)

Hal serupa juga disampaikan Bapak Tamiso (58) Kamituo Desa Sukodadi yang menyatakan bahwa:

“Harapan masyarakat sekitar agar kegiatan pembinaan bisa sepadan dengan kegiatan pembinaan warga disini berharap Pak Lurah agar bisa mendatangkan usztad dari luar untuk membantu Pak Modin mas, dan sebagaian warga disini juga siap untuk membantu dengan uang swadaya agar program Pak Lurah bisa berjalan maksimal.” (wawancara 30 Mei 2015)

(2). Kesadaran Masyarakat, Seperti yang telah digambarkan dari data monografi diatas tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Sukodadi banyak yang tidak sekolah, tingkat pengetahuan yang dimiliki warga sekitar lokalisasi tersebut sangat minim tentang dampak dari keberadaan lokalisasi, sehingga masyarakat tidak tahu bahaya yang ditimbulkannya, misalnya dalam hal ini pola pikir masyarakat terhadap pengawasa orang tua khususnya dalam lingkungan keluarga anak akan rentan terpengaruh dengan keberadaan lokalisasi tersebut. Seperti yang dituturkan oleh Bapak Sudarto (40) Kepala Desa Sukodadi:

“Hambatan-hambatan yang saya alami dalam melakukan pembinaan moral adalah rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua membiarkan anaknya tanpa pengawasan dengan siapa dia berteman di lingkungan lokalisasi, karena tinggal di lingkungan seperti itu anak mudah terpengaruh dari situasi. selain itu belum banyaknya tokoh agama yang berperan aktif dalam melaksakan pembinaan, serta masih lemahnya hubungan pemerintah desa dengan pihak terkait.” (Wawancara 17 April 2015)

Pembahasan

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pembinaan moral masyarakat Desa Sukodadi adalah pertama, melalui penanaman nilai-nilai agama, kesopanan dan asusila dengan diadakannya pembinaan moral bagi masyarakat khususnya pada anak-anak agar tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di lingkungan lokalisasi, karena dengan menanamkan nilai-nilai tersebut seseorang tidak akan terjerumus kedalam hal-hal yang tidak baik. Kedua, upaya yang dilakukan pemerintah desa Sukodadi adalah dilakukannya program penyuluhan kesehatan kepada warga masyarakat Sukodadi sebagai wujud pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh

keberadaan lokalisasi Klubuk. Selain itu juga pemerintah Kelurahan Sukodadi dalam melakukan pembinaan moral menemui beberapa faktor penghambat, antara lain belum banyaknya tokoh agama yang mencoba terjun langsung ke objek lokalisasi sehingga proses pembinaan belum bisa maksimal, masih lemahnya hubungan atau koordinasi pihak pemerintahan yang diwakili kelurahan dan pihak-pihak terkait, serta kesadaran masyarakat, misalnya dalam hal ini pola pikir masyarakat terhadap pengawasa orang tua khususnya dalam lingkungan keluarga anak akan rentan terpengaruh dengan keberadaan lokalisasi tersebut

Parson (1999:14) menyatakan bahwa teori struktural fungsional berupaya menafsirkan sebuah masyarakat sebagai sebuah struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi. Parsons melihat masyarakat adalah sistem sosial yang dilihat secara total. Bilamana sistem sosial sebagai sebuah sistem parsial, maka masyarakat itu dapat berupa setiap jumlah dari sekian banyak sistem yang kecil-kecil, misalnya keluarga, sistem pendidikan, dan lembaga-lembaga keagamaan. Keluarga sebagai sebuah institusi dalam masyarakat mempunyai prinsip-prinsip serupa yang terdapat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Penerapan teori struktural fungsional dalam konteks pemerintahan terlihat dari struktur dan aturan yang ditetapkan. Pemerintah adalah unit universal yang memiliki peraturan. Tanpa aturan atau fungsi yang dijalankan oleh unit pemerintah, maka unit pemerintah tersebut tidak memiliki arti (meaning) yang dapat menghasilkan suatu tujuan tertentu. Bahkan dengan tidak adanya peraturan maka akan tumbuh atau terbentuk suatu generasi penerus yang tidak mempunyai kreasi yang lebih baik dan akan mempunyai masalah emosioanal serta hidup tanpa arah. Adapun peran pemerintah mempunyai tugas sebagai menjalankan tugas-tugas, pencapaian tujuan, integrasi dan solidaritas, serta pola kesinambungan atau pemeliharaan dalam masyarakat. Masyarakat inti seperti sistem sosial lainnya, mempunyai karakteristik yang berupa diferensiasi peran, dan struktur organisasi yang jelas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin, dalam hal ini Kepala Desa Sukodadi sebagai lingkungan pertama bagi masyarakatnya khususnya masyarakat di sekitar lokalisasi klubuk untuk mendapatkan pembinaan baik moral maupun kesehatan, supaya warga masyarakat sekitar lokalisasi tidak terpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan dari lokalisasi tersebut. Untuk melaksanakan fungsinya secara optimal, yakni meningkatkan derajat fungsionalitasnya pemerintah harus mempunyai struktur tertentu. Struktur adalah pengaturan peran dimana sebuah sistem sosial tersusun (Mcintyre, 1966:60). Di dalam pemerintahan, peran kepala desa dalam mengatur tatanan hidup dalam bermasyarakat yang

baik secara bersama untuk memelihara sendi-sendi moral yang ada dalam lingkungan masyarakat sekitar lokalisasi klubuk agar bisa mengatasi hambatan-hambatan yang dialami.

Menurut parson (dalam Puspitawati, 2009:14) ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial, meliputi :

Pertama Adaptation (Adaptasi) warga sukodadi menyesuaikan kondisi dimana mereka bertempat tinggal. Dimana di sekitar lingkungan mereka terdapat lokalisasi klubuk dengan budaya yang ada. Untuk menjalin kerukunan dan menangkal pengaruh-pengaruh buruk dari lokalisasi klubuk warga sukodadi tidak serta merta menutup lokalisasi, namun diadakan pengajian rutin setiap malam jum'at serta penyuluhan kesehatan yang dilakukan 2 sampai 3 bulan sekali.

Kedua Goal attainment (pencapaian tujuan) Sebuah sistem yang ada pada masyarakat kelurahan sukodadi dilakukan untuk menjaga tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut adalah pemerintah kelurahan sukodadi menginginkan warganya memiliki akhlak yang baik dan menjadikan agama islam sebagai pedoman hidup. Di kelurahan sukodadi agama islam dijadikan sebagai sistem yang mengatur segala sendi kehidupan sehingga masyarakat harus belajar agama islam . Agar tidak terpengaruh perilaku-perilaku buruk yang ada di lokalisasi klubuk.

Ketiga Integration (integrasi) Sebuah sistem kebudayaan masyarakat Sukodadi khususnya warga yang tinggal di lingkungan lokalisasi klubuk bagaimana mengatur mengenai cara melakukan pengembangan moral yang diadopsi dari ciri khas kebudayaan masyarakat Sukodadi sendiri yang berdasarkan agama islam. Misalnya, dalam hal memperingati hari besar islam warga masyarakat sekitar lokalisasi mengadakan kegiatan kerohanian, seperti ceramah agama yang mendatangkan langsung ustad dari kota jombang untuk memimpin acara. Secara tidak langsung kegiatan tersebut merupakan salah satu dari pada pembinaan moral yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Keempat Latency (pemeliharaan pola). Pola pembentukan moral pada masyarakat sekitar lokalisasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan sukodadi yang masih memelihara cara dari kebudayaan yang tercermin dalam menjadikan agama islam sebagai pedoman hidup, agama islam dijadikan sebagai pola pemeliharaan yang mengatur segala sendi kehidupan sehingga masyarakat harus belajar agama islam . Agar tidak terpengaruh perilaku-perilaku buruk yang ada di lokalisasi klubuk. dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap warga sekitar lokalisasi klubuk sangat penting sebagai pembentukan kepribadian/watak seseorang serta sebagai pedoman agar dapat hidup secara positif sehingga dapat

diterima dilingkungan keluarga dan masyarakat, serta dapat menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi semua larangannya. Adapun nilai-nilai agama yang ditanamkan pemerintah kelurahan sukodadi kepada kepada warga masyarakat sekitar lokalisasi yaitu ibadah/shalat, kegiatan tahlil dan mendengarkan ceramah agama keliling setiap sebulan sekali, serta sikap bertanggung jawab. Hal tersebut dilakukan agar nantinya warga sekitar lokalisasi klubuk akan terbiasa menerapkan sikap-sikap positif tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Sekarang ini merupakan era globalisasi. Perkembangan semakin pesat dengan ditandai munculnya berbagai macam alat-alat teknologi komunikasi yang canggih. Batas-batas negara pun semakin kabur, akibat pun cukup besar. Bangsa yang tidak bisa memfilter budaya dari luar akhirnya terjerumus ke hal-hal yang sifatnya negative. Moral yang melekat pada bangsa akan kabur jika tidak diimbangi dengan filter budaya. Maka dari itu, pemerintah kelurahan sukodadi yang notabennya sebagai pemimpin harus bisa memfilter perkembangan moral masyarakat khususnya warga sekitar lokalisasi klubuk mempunyai upaya khusus untuk menyelesaikan masalah sosial dan moral masyarakat sekitar lokalisasi klubuk supaya masyarakat bisa mengantisipasi dampak bahaya yang ditimbulkan dari pada lokalisasi tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai upaya pemerintah jombang dalam membina moral masyarakat di daerah skitar lokalisasi klubuk kelurahan sukodadi kecamatan kabuh kabupaten jombang dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan sukodadi melalui : (1) penanaman nilai-nilai agama, misalnya diakkannya pengajian rutin setiap malam jum'at di masjid yang letaknya di area lokalisasi, (2) Penyuluhan dampak lokalisasi klubuk terhadap kesehatan masyarakat di lakukan oleh pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial dan bekerjasama dengan Puskesmas Kabuh melalui program PUSLING (Puskesmas keliling) yang di lakukan 2 sampai 3 bulan sekali.

Upaya pemerintah jombang dalam membina moral masyarakat di daerah skitar lokalisasi klubuk kelurahan sukodadi kecamatan kabuh kabupaten jombang juga mengalami beberapa hambatan yaitu : (1) Belum banyaknya tokoh agama yang mencoba terjun langsung ke objek lokalisasi sehingga proses pembinaan belum bisa maksimal, (2) Masih lemahnya hubungan atau koordinasi pihak pemerintahan yang diwakili kelurahan dan pihak-pihak terkait, (3) Kesadaran Masyarakat.

Saran

Dari hasil penelitian terhadap upaya pemerintah jombang dalam membina moral masyarakat di daerah sekitar lokalisasi klubuk kelurahan sukodadi kecamatan kabuh kabupaten jombang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : (1). Masyarakat Desa Sukodadi khususnya orang tua yang mempunyai anak remaja sebaiknya lebih memberikan perhatian kepada anak-anaknya agar tidak terpengaruh dengan keberadaan lokalisasi tersebut. Karena remaja rentan terpengaruh oleh hal-hal yang ada di sekitarnya. (2). Warga masyarakat Desa Sukodadi sebaiknya senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga khususnya sang suami agar tidak terpengaruh dengan keberadaan lokalisasi. (3). Pemerintah Kabupaten Jombang sebaiknya lebih tegas dalam menangani keberadaan lokalisasi Klubuk dan memberikan pembinaan moral terhadap masyarakat sukodadi dan para PSK agar memiliki keterampilan lain yang lebih baik. (4). Warga masyarakat Desa Sukodadi agar lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Tuhan YME agar tidak terpengaruh oleh keberadaan lokalisasi Klubuk

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Budiningsih, Asri. Soenarjati . (1989). Pembelajaran Moral. Jakarta : Rineka Cipta
- Zuriah, Nurul. 2007. Pendidikan Moral dan Budi Pekerti. Malang : Bumi Aksara.
- Kahar, Mansyur. Mangunhardjana (1986). Membina Moral dan Ahlak. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Rozali Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta : PT Raja Grasindo.
- Lexy J. Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soedjono, D. 1977. Pelacuran, Ditinjau dari segi hukum dan kenyataan dalam masyarakat. Bandung: Penerbit Karya Nusantara.
- Soedjono, D.1982. Pathologi Sosial. Bandung: Alumni.
- Soemarwoto, Otto. 1987. Analisis Dampak Lingkungan. Bandung: Gadjah Mada University Pres.
- Kartinah, Dwi. 2009. Permasalahan Sosial Di Sekitar Kita. (Online), (<http://kupu-kupu-anime.blogspot.com/>) diakses 27 Februari 2015.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2000. (online),

(<http://www.bappenas.go.id/node/123/19/uu-no-32-tahun-2004-tentangpemerintahan-daerah/>), diakses pada 13 Maret 2015)

Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007

Mc.Quarrie,Donald. 1995. Reading In Contemporary Sociological Theory From Modernitiy. Prentice Hall,inc.,Englewood Cliffs, New Jersey.

Widiyastuti, Diah. 2007. Sejarah perpindahan lokalisasi sunan kuning dari karang kembang ke sunan kuning Di kelurahan kalibanteng kulon semarang tahun 1960-2000.Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/24/sekilas-sejarah-pelacuran-di-indonesia>. (Online), diakses 15 Februari 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran_menurut_agama. (Online), diakses 15 Februari 2015.

http://nu.or.id/page/id/dinamic_detil/2/6246/Warta_Daerah/MUI_Keluarkan_Fatwa_Penertiba_Tempat_Hiburan.html). (Online), diakses 5 Maret 2015.

<http://www.harianbhirawa.co.id/konflik/19056-nu-jatim-dukung-penutupan-dolly>. (Online), diakses 5 Maret 2015.

<http://www.nahimunkar.com/nu-jatim-dukung-penutupan-pusat-pelacuran-dolly/>. (Online), diakses 5 Maret 2015.

Hadista, Ari. 2012. Strategi Orang Tua Dalam Membentuk Perilaku Mandiri Anak di Dusun Glagah Banyulegi Kecamatan Dawar Mojokerto. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya : FIS Unesa.

Kurniati, Septina Nunuk. 2011. Strategi Orang Tua Dalam Pendidikan Moral Anak di Daerah Lokalisasi Dolly. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya :FIS Unesa.

Aktavia, Risa Ayu. 2014. Strategi bertahan pekerja seks komersial Di lokalisasi jarak surabaya. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya : FIS Unesa

Indrawati, Fitri. 2011. "Strategi Penanaman Nilai dan Moral Di Panti Asuhan Khadijah 3 Surabaya". Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Unesa.